



DPRD Sayangkan Pencabutan Moratorium Hotel

YOGYA, TRIBUN - DPRD Kota Yogyakarta mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta untuk menarik kembali Peraturan Walikota (Perwal) nomor 65 tahun 2018 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel. Hal tersebut diserukan Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Nasrul Khoiri.

"Kami juga meminta agar Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan evaluasi dengan melibatkan komponen-komponen masyarakat, termasuk DPRD Kota Yogyakarta," terangnya, Kamis (3/1).

la menjelaskan, terbitnya perwal tersebut, meski Pemerintah Kota Yogyakarta mengatakan telah mempertimbangkan beberapa aspek kajian, tapi bila dirasakan dengan nurani yang

Nasrul menuturkan, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan Pemkot Yogyakarta sebelum mencabut moratorium pendirian hotel. Salah satunya yakni pada saat moratorium masih diberlakukan, masih ada investor yang melanggar aturan dengan sengaja mengalkali aturan sehingga menurunkan marwah Pemkot Yogyakarta.

Selain itu, lanjutnya, banyak masyarakat yang mengeluh dan mengadakan ke DPRD Kota Yogyakarta maupun ke lembaga ombudsman mengenai dampak pembangunan hotel atau hunian bertingkat yang mengabaikan aspek sosial dan lingkungan hidup. "Mirisnya keluhan dan aspirasi masyarakat

● ke halaman 15

Kami juga meminta agar Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan evaluasi dengan melibatkan komponen-komponen masyarakat, termasuk DPRD Kota Yogyakarta.

ni masih terasa mengabaikan aspirasi masyarakat. "Ini juga menegaskan bahwa pemerintah kota berdiri lebih condong kepada kepentingan investor," tandasnya.

DPRD Sayangkan

● Sambungan Hal 9

sebut selalu mentok pada jawaban pemerintah kota yang normatif dan tidak solutif," ujar Nasrul.

Terkait Pendapat Asli Daerah (PAD), dijelaskan politik PKS tersebut, belum menunjukkan bukti empirik sumbangsih hotel kepada peningkatan signifikan atas pendapatan asli daerah (PAD), yang salah satunya disebabkan pemkot belum menyiapkan sistem yang integral atas potensi PAD dari pajak hotel.

"Pemerintah Kota Yogyakarta tidak pernah melistikan DPRD Kota Yogyakarta dalam persiapan kebijakan pencabutan moratorium ini. Padahal kedudukan DPRD Kota Yogyakarta sebagai salah satu unsur pemerintah daerah tidak boleh dinafikan begitu saja" ujarnya.

Senada dengan pernyataan Nasrul Khoiri, Ketua Komisi C DPRD Kota Yogyakarta, Christiana Agustiani menyayangkan kebijakan tersebut. Menurutnya, Pemkot Yogyakarta lebih sanggup memikirkan nasib investor mencari rezeki di Kota Yogyakarta dibandingkan dengan warga kota yang terseok-seok mengumpulkan rezeki.

"Ada warga kota yang tiap harinya keliling Maliboro dengan menjual makanan dan minuman yang dibawa. Pendapatan tidak seberapa. Itu pun harus dikejar-kejar Satpol PP. Pemerintah harusnya bisa memikirkan masyarakat yang

bih membutuhkan," ujarnya. Disinggung mengenai kebijakan yang diberlakukan juga untuk izin guest house di Kota Yogyakarta seiring dengan kemunculan perwal tersebut, wanita yang akrab disapa Ana tersebut mengemukakan pendapatnya. "Jika bangunan itu sudah ada mungkin, tidak apa-apa. Tetapi jika itu bangunan baru, kalau menurut saya diberhentikan dulu," ujarnya.

Guest house

Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Ponewadi dalam Jumpa Pers mengenai moratorium hotel menegaskan poin mengenai pemberian izin mendirikan guest house di Kota Yogyakarta.

"Kami mempertimbangkan guest house agar masyarakat lokal di Yogya dan sekitarnya menikmati kue wisata yang insyaallah jadi motor penggerak ekonomi Yogya. Selama ini banyak masyarakat mempunyai potensi untuk mengembangkan rumahnya agar memenuhi standar dan bisa diterima jaringan. Nanti kami akan terbitkan standar pelayanan bagi guest house agar standar terpenuhi, tidak membuat wisatawan kecewa," terangnya.

la menuturkan, sebenarnya saat ini sudah banyak guest house yang tersebar di Yogyakarta, tapi belum bisa memenuhi syarat maupun standar yang ada. "Banyak yang belum berizin dan belum mampu kita lacak seluruhnya. Tetapi real nyata, di kawasan ring

satu banyak rumah dijadikan guest house. Pas liburan banyak yang datang, dia fungsikan untuk wisatawan menginap," ujarnya.

la pun mengatakan, ketika mereka yang sudah mempunyai usaha di sana, harapannya ke depan mampu memenuhi standar kamar dan sarana prasarana yang lain. "Kalau yang belum tertarik, jadi bisa tertarik dan membangun. Seluruh kawasan harapannya terpenuhi karena sebagian besar motor ekonomi kota dari pariwisata," pungkasnya.

Sementara itu, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X mengaku pencabutan moratorium hotel ini bisa dilaksanakan asal tetap selektif dalam izin pendirian hotel. Dia juga meminta ada pembatasan sesuai dengan yang dibutuhkan di kawasan. "Soal pencabutan moratorium) kan wewenang pemerintah kota, harus selektif tidak setiap izin diberikan," jelasnya di kompleks Kepatihan, Kamis (3/1).

Dia juga mengatakan adanya pembatasan untuk kelas hotel dengan disesuaikan kebutuhan. "Misalnya, dibatasi bintang 4 atau 5 kamar sekian," ujarnya. Untuk pembangunan hotel juga tidak diperbolehkan terlalu luas atau melebar, tapi diminta naik ke atas. Sultan pun mengklaim tidak mengganggu penerbangan karena akan ada bandara NYIA. "Atau, dibangun di ringroad tingkat berapajuga bisa," ulasnya. (kur/als)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005